

KONTRIBUSI PENDIDIKAN DALAM MEMBANGUN PENGETAHUAN DAN KARAKTER BANGSA

Arcadius Benawa

Jurusan Psikologi, Fakultas Humaniora, BINUS University
Jln. Kemanggisan Ilir III No. 45, Kemanggisan/Palmerah, Jakarta Barat 11480
aribenawa@binus.ac.id

ABSTRACT

Education principally is process of making young people into maturity level in facing many aspects of life, especially in education, skills, and behaviour. Therefore, education is supposed to give positive contributions for the development of knowledge and nation building. On the other hand, nowadays people were concerned on the fact that even though the education was well-developed in Indonesia, but this development did not reflect to the , in which they were not able to perform their self image as educated and having positive characters nation. Article wanted to answer that problems, that was to find out appropriate education system that was able to give contribution on the development of the knowledge and characters' of the nation.

Keywords: *education, knowledge development, nation building*

ABSTRAK

Pendidikan pada hakikatnya adalah mendewasakan manusia muda dari pelbagai aspeknya, utamanya di bidang pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Oleh karena itu, sudah semestinyalah pendidikan berkontribusi positif bagi pembangunan pengetahuan dan karakter bangsa. Akan tetapi kita prihatin bahwa dewasa ini di Indonesia yang semakin berkembang pendidikannya tetapi tidak serta merta meningkatkan jati dirinya sebagai bangsa berpengetahuan dan berkarakter. Berdasarkan keprihatinan seperti itulah tulisan ini disusun untuk memperoleh titik terang tentang pendidikan seperti apa yang sungguh bisa berkontribusi terhadap pembangunan pengetahuan dan karakter bangsa.

Kata kunci: *pendidikan, pengetahuan, karakter bangsa*

PENDAHULUAN

Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas pendidikan, dan kualitas pendidikan ditentukan oleh tenaga pendidik entah guru ataupun dosen. Alasan penulis memilih judul ini mengingat belakangan ini terjadi berbagai masalah pendidikan nasional yang menjadi bulan-bulanan kritik di masyarakat. Mengapa pendidikan di Indonesia tidak menghasilkan pribadi yang unggul dalam ilmu pengetahuan? Penulis melihat bangsa ini tengah digoyang oleh berbagai macam aksi kekerasan, kerusuhan, anarki, dan tindakan-tindakan amoral lainnya.

Landasan sosial-budaya sebagai tiang pendidikan tengah mengalami krisis. Konflik sosial-budaya yang terjadi dalam beberapa tahun ini menunjukkan adanya krisis multidimensi. Fenomena tersebut membuat kesadaran nurani kita tersentuh dan mempertanyakan kembali makna pendidikan yang hakiki. Penulis melihat bahwa model pendidikan kita kurang berbasis pada kemanusiaan, sehingga peserta didik dan produk pendidikan di Indonesia rentan terhadap konflik kemanusiaan dan disintegrasi sosial-budaya.

Oleh karena itu, pendidikan sebagai sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa memiliki peranan yang sangat strategis. Pendidikan berkontribusi dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang bermutu. Selain itu, pendidikan juga berfungsi mengembangkan kemampuan dan menumbuhkan nilai dan sikap yang serasi dengan tuntutan pembangunan dan kehidupan negara bangsa Indonesia yang modern.

Sejarah dunia membuktikan bahwa negara-negara di dunia, yang menjadi negara maju seperti AS, Britania Raya, Jerman, Perancis, Belanda, dan Jepang adalah negara yang telah mendudukkan pendidikan sebagai bagian terpadu dari pembangunan bangsanya. Untuk itu, sejak awal pembangunan mereka menuntut sekurang-kurangnya 5 % dari GDP-nya untuk dana pendidikan.

Negara tersebut termasuk pemegang moto "*to build nation, build school*", membatasi pengertian sistem pendidikan pada sistem persekolahan. Bahkan UUD negara Jerman pada Pasal 7 tidak menyebut sistem pendidikan, melainkan *school education*, "*the entire school education is under the supervision of the state*". Talcott Parsons dan Alex Inkeles, 2 (dua) orang ahli sosiologi tersebut ikut menyoroti peranan pendidikan dalam pembangunan bangsa AS.

METODE

Artikel disusun berdasarkan studi pustaka berupa literatur yang terkait dengan pendidikan, sejarah pendidikan, bahasan sosial, budaya, dan dokumen pemerintah berupa undang-undang.

PEMBAHASAN

Sekolah sebagai lembaga pendidikan yang bersifat massal, seperti lembaga sosial, muncul bersamaan dengan proses industrialisasi yang mengakibatkan terjadinya urbanisasi, vokasionalisasi, spesialisasi, yang mendorong orang tua merasa tenang untuk meninggalkan anak-anaknya di sekolah tanpa harus ditunggu, dan orang tua bisa terus bekerja. Karena itulah diperlukan suatu Lembaga Pendidikan yang khusus menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tuntutan baru masyarakat modern. Sekolah yang dimaksud tersebut adalah sekolah seperti yang dimaksud oleh Yehudi A. Cohen, seorang Antropolog, "*by a school, I mean an institution devoted to instruction with specialized personnel, permanent physical structure, special apparatus (of which text are important part), formal and stereotype means of instruction, a curriculum, and rationally defined manifest objectives*".

Sesungguhnya secara formal, sekolah/kampus di Indonesia telah cukup memenuhi syarat seperti yang dimaksud oleh Cohen tersebut, seperti adanya : Tenaga Pengajar Khusus (guru / dosen), gedung permanen, perlengkapan belajar, metode pembelajaran, perangkat kurikulum, dan tujuan pendidikan yang harus dicapai. Namun mengapa lembaga pendidikan di Indonesia yang secara formal telah memenuhi syarat, tetapi belum mampu melaksanakan fungsinya seperti pada Negara-negara maju?

Dapat dipahami bahwa, (1) pada setiap elemen sekolah, kondisinya sangat jauh dari standard seperti, jaminan kesejahteraan guru/dosen kurang memadai, sehingga tidak dapat berkonsentrasi melakukan fungsinya secara profesional sebagai Tenaga Pendidik dan Tenaga Pengajar. (2) pada setiap sumber belajar, pengadaan buku sangat terbatas, laboratorium untuk melakukan riset atau laboratorium untuk pengembangan bahasa asing juga tidak ada, kebun pertanian untuk latihan uji-coba menanam juga tidak dimiliki, (3) Pada setiap metode pembelajaran, kondisi sangat tradisional, kurikulum yang dipakai tidak mengutamakan esensi, fungsi, dan relevansinya. Begitu juga dengan tujuan yang harus dicapai dengan praktik pembelajarannya sangat jauh dari harapan.

Sedangkan tujuan pendidikan yang harus dicapai pada Pasal 13 Ayat 1 adalah "untuk mengembangkan sikap dan kemampuan serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar untuk dapat hidup dalam masyarakat serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti Pendidikan Menengah", dan pada Pasal 14 Ayat 1 adalah, "Pendidikan Menengah diselenggarakan untuk melanjutkan dan meluaskan Pendidikan Dasar serta menyiapkan Peserta Didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan mengadakan hubungan timbal-balik dengan lingkungan sosial-budaya, dan alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam dunia kerja atau Pendidikan Tinggi".

Sangat jelas bahwa sekolah atau lembaga pendidikan belum dapat berfungsi secara optimal untuk menyiapkan generasi muda yang memiliki kemampuan, nilai, dan sikap, yang dituntut oleh masyarakat Indonesia pada saat ini, yang sedang membangun kehidupan negara bangsa modern.

Pada bidang sosial-budaya, masyarakat Indonesia kurang menyadari bahwa pada saat kita memproklamasikan Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, nilai budaya yang menjadikan setiap warga Negara Indonesia merasa 1 (satu) keluarga bangsa Indonesia masih terbatas. Perlu diingat bahwa sebelum kita dijajah oleh Belanda pada pertengahan abad ke-7, wilayah Nusantara sudah lama terpecah menjadi berbagai kerajaan.

Selama 300 tahun lebih kita dijajah Belanda, upaya bangsa Indonesia untuk menjadi 1 (satu) kesatuan budaya di kalangan elit melalui pendidikan sangat terbatas. Pada saat dijajah Jepang selama 3,5 tahun, hampir tidak ada waktu untuk membangun 1 (satu) budaya nasional, justru yang terjadi adalah lahirnya kesamaan nasib dan penderitaan yang mendorong lahirnya satu tekad bersama, yaitu menjadi satu bangsa merdeka. Karena hanya dengan merdeka, sebagai 1 (satu) bangsa dapat membangun suatu masyarakat yang adil dan makmur di wilayah Nusantara. Tekad untuk membangun 1 (satu) bangsa ini tampaknya kurang didukung oleh infrastruktur yang memadai, terutama Sistem Pendidikan Nasional, karena itu pada saat perjanjian, bahwa bersatunya wilayah Nusantara menjadi 1 (satu) bangsa yang merdeka merupakan jembatan emas bagi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur tidak kunjung tercapai, akhirnya muncul kekecewaan yang melahirkan berbagai kejadian yang mengarah pada disintegrasi bangsa.

Sebagai akibat perkembangan ekonomi yang tidak berakar pada kekuatan nyata masyarakat Indonesia, berbagai potensi negatif masyarakat seperti "aji mumpung", ingin cepat menikmati keuntungan, persaingan tidak sehat, nepotisme, korupsi, dan kolusi, berkembang sangat cepat dan berakibat terjadi penumpukan kekayaan di tangan kelompok yang dekat dengan kekuasaan, sehingga memperluas jurang antara si kaya dengan si miskin. Kondisi yang memprihatinkan ini terus

berkembang, sehingga pada saat krisis datang, berbagai tingkah laku sosial yang negatif, seperti : tingkah laku yang destruktif, sadistis, kejam bermunculan. Padahal, pada hakikatnya, tingkah laku sosial semacam ini sangat bertentangan dengan nilai luhur yang berakar pada ajaran agama yang telah berabad-abad menjadi ciri keunggulan watak masyarakat Indonesia.

Pada era Orde Baru, masyarakat Indonesia terutama pada generasi muda, menyaksikan terjadi kesenjangan antara idealisme dan kenyataan, antara kata dan perbuatan, antara cita-cita atau ketentuan hukum dan pelaksanaan hukum, antara nilai-nilai luhur yang banyak disampaikan dengan praktik kehidupan yang dijalankan. Semua itu menjadikan fondasi mental masyarakat Indonesia lebih parah, terutama pada generasi muda dan kelompok masyarakat yang tidak beruntung, sehingga secara potensial setiap saat dapat muncul protes melalui perilaku radikal yang kurang sesuai dengan norma sosial-budaya, susila, dan agama.

Pendidikan Karakter demi Membangun Karakter Bangsa

Dalam Kamus Poerwadarminta, "karakter" diartikan sebagai tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang daripada yang lain. Dengan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa pembangunan karakter (*character building*) adalah proses mengukir atau memahat jiwa sedemikian rupa, sehingga 'berbentuk' unik, menarik, dan berbeda atau dapat dibedakan dengan orang lain.

Tentang proses pembentukan karakter ini dapat disebut nama Helen Keller (1880-1968). Wanita yang buta dan tuli di usia 19 bulan ini luar biasa. Berkat bantuan keluarganya dan bimbingan Anne Sullivan (sang guru yang juga buta dan setelah melewati serangkaian operasi akhirnya dapat melihat secara terbatas), Keller berhasil menjadi manusia buta-tuli pertama yang lulus *cum laude* dari Radcliffe College di tahun 1904. Helen Keller pernah berkata: "*Character cannot be developed in ease and quiet. Only through experience of trial and suffering can the soul be strengthened, vision cleared, ambition inspired, and success achieved*". Helen Keller adalah model manusia berkarakter (terpuji). Sejarah hidupnya mendemonstrasikan bagaimana proses membangun karakter itu memerlukan disiplin tinggi karena tidak pernah mudah dan seketika atau instan. Diperlukan refleksi mendalam untuk membuat rentetan *moral choice* (keputusan moral) yang ditindaklanjuti dengan aksi nyata, sehingga menjadi praksis, refleksi, dan praktik. Diperlukan sejumlah waktu untuk membuat semua itu menjadi *custom* (kebiasaan) dan membentuk watak atau tabiat seseorang.

Bahwa karakter itu penting bagi kehidupan manusia dewasa ini dinyatakan oleh Antonin Scalia, "*bear in mind that brains and learning, like muscle and physical skills, are articles of commerce. They are bought and sold. You can hire them by the year or by the hour. The only thing in the world NOT FOR SALE IS CHARACTER. And if that does not govern and direct your brains and learning, they will do you and the world more harm than good*".

Pendidikan

Tentang pendidikan, Azyumardi Azra mengartikannya sebagai proses di mana suatu bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. Bahkan ia menegaskan, bahwa pendidikan lebih dari sekadar pengajaran. Artinya, pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa atau negara membina dan mengembangkan kesadaran diri di antara individu.

Di samping itu, pendidikan adalah suatu hal yang benar-benar ditanamkan demi menempa fisik, mental, dan moral bagi individu, agar mereka menjadi manusia yang berbudaya, sehingga diharapkan mampu memenuhi tugasnya sebagai manusia yang diciptakan Allah sebagai makhluk yang sempurna dan terpilih sebagai khalifah-Nya di muka bumi ini yang sekaligus menjadi warga negara yang berarti dan bermanfaat bagi suatu negara.

Disadari, bahwa pembentukan karakter dan watak atau kepribadian ini sangat penting, bahkan sangat mendesak dan mutlak adanya. Hal ini cukup beralasan. Karena adanya krisis yang terus berkelanjutan melanda bangsa dan negara kita sampai saat ini belum ada solusi secara jelas dan tegas, lebih banyak berupa wacana yang seolah-olah bangsa ini diajak masuk dalam dunia mimpi. Banyak kalangan masyarakat yang mempunyai pandangan terhadap istilah "kelatahan sosial" yang terjadi akhir-akhir ini. Hal ini memang terjadi dengan berbagai peristiwa, seperti tuntutan demokrasi yang diartikan sebagai kebebasan tanpa aturan, tuntutan otonomi sebagai kemandirian tanpa kerangka acuan yang mempersatukan seluruh komponen bangsa, hak asasi manusia yang terkadang mendahulukan hak daripada kewajiban. Pada akhirnya berkembang ke arah berlakunya hukum rimba yang memicu kesukubangsaan (*ethnicity*). Kerancuan ini menyebabkan orang frustrasi dan cenderung meluapkan perasaan tanpa kendali dalam bentuk "amuk massa atau amuk sosial".

Berhadapan dengan berbagai masalah dan tantangan, pendidikan nasional pada saat yang sama (masih) tetap memikul peran multidimensi. Berbeda dengan peran pendidikan pada negara-negara maju, yang pada dasarnya lebih terbatas pada transfer ilmu pengetahuan, peranan pendidikan nasional di Indonesia memikul beban lebih berat. Pendidikan berperan bukan hanya sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan saja, tetap lebih luas lagi sebagai pembudayaan yang tentu saja hal terpenting dari pembudayaan itu adalah pembentukan karakter dan watak (*nation and character building*), yang pada gilirannya sangat krusial bagi *nation building* atau dalam bahasa lebih populer menuju rekonstruksi negara dan bangsa yang lebih maju dan beradab.

Oleh karena itu, reformasi pendidikan sangat mutlak diperlukan untuk membangun karakter atau watak suatu bangsa, bahkan merupakan kebutuhan mendesak. Reformasi kehidupan nasional secara singkat, pada intinya bertujuan untuk membangun Indonesia yang lebih *genuinely* dan *authentically* demokratis dan berkeadaban, sehingga betul-betul menjadi Indonesia baru yang madani, yang bersatu padu. Di samping itu, peran pendidikan nasional dengan berbagai jenjang dan jalurnya merupakan sarana paling strategis untuk mengasuh, membesarkan dan mengembangkan warga negara yang demokratis dan memiliki keadaban kemampuan, keterampilan, etos dan motivasi serta berpartisipasi aktif, merupakan ciri dan karakter paling pokok dari suatu masyarakat madani Indonesia.

Pendidikan Karakter

Tidak perlu disangsikan lagi, bahwa pendidikan karakter merupakan upaya yang harus melibatkan semua pihak baik rumah tangga dan keluarga, sekolah dan lingkungan sekolah, masyarakat luas. Oleh karena itu, perlu menyambung kembali hubungan dan *educational networks* yang mulai terputus tersebut. Pembentukan dan pendidikan karakter tersebut, tidak akan berhasil selama antarlingkungan pendidikan tidak ada kesinambungan dan keharmonisan.

Dengan demikian, rumah tangga dan keluarga sebagai lingkungan pembentukan dan pendidikan karakter pertama dan utama harus lebih diberdayakan. Keluarga hendaklah kembali menjadi *school of love*, sekolah untuk kasih sayang atau tempat belajar yang penuh cinta sejati dan kasih sayang (keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warrohmah*). Sedangkan pendidikan karakter melalui sekolah, tidak semata-mata pembelajaran pengetahuan semata, tetapi lebih dari itu, yaitu penanaman moral, nilai-nilai etika, estetika, budi pekerti yang luhur dan lain sebagainya. Pemberian penghargaan kepada yang berprestasi, dan hukuman kepada yang melanggar, menumbuhkan nilai-nilai yang baik dan sebaliknya mencegah dan mencegah berlakunya nilai-nilai yang buruk. Selanjutnya menerapkan pendidikan berdasarkan karakter (*carácter based education*) dengan menerapkan ke dalam setiap pelajaran yang ada di samping mata pelajaran khusus untuk mendidik karakter, seperti; pelajaran Agama, Sejarah, Moral Pancasila dan sebagainya.

Di samping itu tidak kalah pentingnya pendidikan di masyarakat. Lingkungan masyarakat juga sangat mempengaruhi terhadap karakter dan watak seseorang. Lingkungan masyarakat luas sangat

mempengaruhi terhadap keberhasilan penanaman nilai-nilai etika, estetika untuk pembentukan karakter. Menurut Qurais Shihab, situasi kemasyarakatan dengan sistem nilai yang dianutnya, mempengaruhi sikap dan cara pandang masyarakat secara keseluruhan. Jika sistem nilai dan pandangan mereka terbatas pada kini dan di sini, maka upaya dan ambisinya terbatas pada hal yang sama.

Apabila kita cermati bersama, bahwa desain pendidikan yang mengacu pada pembebasan, penyadaran dan kreativitas sesungguhnya sejak masa kemerdekaan sudah digagas oleh para pendidik kita, seperti Ki Hajar Dewantara, KH. Ahmad Dahlan, Prof. HA. Mukti Ali. Ki Hajar Dewantara misalnya, mengajarkan praktik pendidikan yang mengusung kompetensi/kodratan alam anak didik, bukan dengan perintah paksaan, tetapi dengan "tuntunan" bukan "tontonan". Sangat jelas cara mendidik seperti ini dikenal dengan pendekatan "*among*" yang lebih menyentuh langsung pada tataran etika, perilaku yang tidak terlepas dengan karakter atau watak seseorang. KH. Ahmad Dahlan berusaha "mengadaptasi" pendidikan modern Barat sejauh untuk kemajuan umat Islam, sedangkan Mukti Ali mendesain integrasi kurikulum dengan penambahan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan. Namun mengapa dunia pendidikan kita yang masih berkuat dengan problem internalnya, seperti penyakit dikotomi, profesionalitas pendidiknya, sistem pendidikan yang masih lemah, perilaku pendidiknya dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, membangun karakter dan watak bangsa melalui pendidikan mutlak diperlukan, bahkan tidak bisa ditunda, mulai dari lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat dengan meneladani para tokoh yang memang patut untuk dicontoh.

Apalagi Pendidikan Nasional sendiri pada hakikatnya adalah pendidikan karakter, seperti tertulis dalam Undang-Undang Pendidikan sejak tahun 1950 sampai dengan tahun 2003 dengan rumusan sebagai berikut :

1. Dalam Undang-Undang No. 4, Tahun 1950 jo, No. 12, Tahun 1954, tujuan Pendidikan Nasional adalah, "membentuk manusia susila yang cakap dan demokratis serta bertanggung-jawab".
2. Dalam Undang-Undang No. 2, Tahun 1989, tujuan Pendidikan Nasional ditulis, "Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan berbudi-pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantab, dan mandiri, serta bertanggung-jawab terhadap kemasyarakatan dan kebangsaan".
3. Dalam Undang-Undang No. 20, Tahun 2003, tujuan Pendidikan Nasional dirumuskan, "Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi Peserta Didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung-jawab.

Dari 3 (tiga) Undang-Undang tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah melahirkan manusia Indonesia yang memiliki: susila, demokratis, bertanggung jawab, beriman, bertanggung-jawab terhadap Tuhan YME, berbudi pekerti luhur, sehat jasmani rohani, berkepribadian yang mantab dan mandiri, serta memiliki rasa tanggung-jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.

Sulit untuk dapat dipahami apabila akan memahami karakter bangsa tanpa memahami filosofi dan pandangan dasar kenegaraan yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pasal-Pasal yang menggambarkan struktur Pemerintahan NKRI sesuai dengan Pembukaan dan Pasal-Pasal UUD 1945, yaitu: Melindungi Segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia, Memajukan Kesejahteraan Umum, Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, dan Ikut Melaksanakan Ketertiban Dunia yang Berdasarkan Kemerdekaan, Keadilan Sosial, dan Perdamaian Abadi.

Pada Pasal 31 dan Pasal 32, UUD 1945, Pemerintah RI diwajibkan untuk "Mengusahakan dan Menyelenggarakan Satu Sistem Pengajaran Nasional" atau "Sistem Persekolahan, dan Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia". Namun amanat dari para Pendiri RI tersebut kurang dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Pada amanat tersebut jelas ditekankan: (1) Kewajiban Pemerintah RI membiayai penyelenggaraan wajib belajar; (2) Kewajiban Pemerintah RI memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 % dari APBN dan APBD; (3) Kewajiban Pemerintah RI untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 3, tercantum bahwa "sebagai sasaran dan fungsi pendidikan nasional, yaitu terbangunnya peradaban bangsa yang bermartabat". Hal itu memperlihatkan bahwa "pendidikan yang bermakna membangun karakter bangsa, atau dalam membangun peradaban bangsa".

Membawa bangsa Indonesia menuju bangsa yang modern, merupakan transformasi dari sosial-budaya, karena terciptanya sistem negara yang demokratis memerlukan waktu dan proses yang sangat panjang. Sebagian besar bangsa Indonesia adalah petani tradisional, dan belum pernah terlibat sebagai tenaga administrasi penyelenggara negara, dan pengelola model perdagangan maupun industri, sedangkan tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia adalah membawa bangsa Indonesia menuju bangsa modern abad ke-20.

Dalam memajukan sosial-budaya dalam membangun karakter bangsa dan mencerdaskan kehidupan bangsa, Talcott Parsons menyampaikan pemikirannya, "way of acting and way of orienting", yang merupakan suatu langkah total dalam menjawab tantangan kehidupan, mengolah, dan memberi makna, yang berupa keinginan seseorang dalam mewujudkan karya nyata maupun implementasinya. Secara garis besar, maknanya adalah mencerdaskan bangsa dalam arti, memandang secara keseluruhan dan dapat bertindak menghadapi tantangan politik, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sosial-budaya.

Dalam menyiapkan generasi muda yang memiliki kemampuan, nilai, dan sikap yang diperlukan bagi kehidupan bangsa Indonesia yang modern tidak diupayakan dengan sungguh-sungguh dalam proses pembelajaran maupun dalam proses sosialisasi di Lembaga-lembaga Pendidikan, baik di dalam maupun di luar sekolah, karena belum mantabnya: sistem politik, sistem ekonomi nasional, belum adanya budaya nasional yang teratur, rentannya solidaritas dan ketahanan nasional, serta rendahnya produktivitas dan etos kerja nasional.

Seperti yang disampaikan oleh Gabriel A. Almond dan Sydney Verba, "*the complex infrastructure of the democratic polity-political parties, interest group, and the media of communication and the understanding of their inner working operating norms, and social psychological preconditions are only now being realized in the West. Thus, the image of democracy polity that is conveyed to the elites of the new notions is obscure and incomplete and heavily stressed ideology and legal norms. What must be learned about democracy is a matter of attitude and feeling, and this is harder to learn?*". Berbagai macam permasalahan atau belum stabilnya sistem politik secara demokratis dikarenakan belum tersentuhnya sikap dan perasaan dari para birokrat di pemerintahan.

Sistem Kurikulum yang Relevan untuk Pendidikan Karakter

Bentuk model pembelajaran yang baik adalah dengan menerapkan strategi pendidikan dalam proses pembudayaan, atau pembentukan karakter, seperti 4 (empat) pilar yang dicanangkan oleh UNESCO: *Learning to Know, Learning to Do, Learning to Live Together, dan Learning to Be* sesuai juga dengan UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat 1 bahwa, "setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu", karena itu bila semua terpenuhi, dan sistem kurikulum dirancang dan dilaksanakan secara relevan, maka cita-cita untuk menjadikan pendidikan sebagai wahana

pembentukan karakter bangsa akan dapat terlaksana, dan masalah persatuan bangsa dengan sendirinya juga akan teratasi, dan bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang cerdas kehidupannya, dan menjadi bangsa yang memiliki karakter Pancasila.

SIMPULAN

Mengembangkan kepribadian manusia sebagai manusia yang memiliki kepribadian sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk budaya, yang mampu menanggapi secara kritis dan berwawasan luas masalah sosial-budaya yang terjadi di lingkungannya secara halus, arif, dan manusiawi, maksudnya adalah, (1) Manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia sebagai individu yang tidak akan mampu hidup sendiri dan berkembang dengan sempurna tanpa hidup bersama dengan manusia lain. Seperti pada saat lahir, manusia sudah hidup bersama Ibu dan Ayahnya yang memelihara dan melindungi, semua itu didasarkan oleh kebutuhan manusia yang dapat terpenuhi apabila mendapat bantuan dari manusia lain, dengan kata lain manusia harus hidup bermasyarakat, saling berhubungan, berinteraksi, untuk memperjuangkan dan memenuhi keinginannya, (2) Manusia sebagai makhluk budaya adalah manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang sempurna, karena sejak lahir telah memiliki akal (*ratio*), rasa (*sense*), dan keinginan (*will, wish*). Manusia mampu mengembangkan budayanya apabila berhubungan dengan manusia lain, dan dapat mempertimbangkan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang bermanfaat dan mana yang merugikan. Pertimbangan tersebut merupakan dasar terjadinya nilai budaya yang menjadi norma (pedoman) dalam hidup bermasyarakat.

Landasan sosial-budaya sebagai tiang pendidikan tengah mengalami krisis. Konflik sosial-budaya yang terjadi dalam beberapa tahun ini menunjukkan adanya krisis multidimensi. Fenomena tersebut membuat kesadaran nurani kita tersentuh dan mempertanyakan kembali makna pendidikan yang hakiki. Penulis melihat bahwa model pendidikan kita kurang berbasis pada kemanusiaan, sehingga peserta didik dan produk pendidikan di Indonesia rentan konflik kemanusiaan dan disintegrasi sosial-budaya. Oleh karena itu, pendidikan sebagai sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa memiliki peranan yang sangat strategis. Pendidikan berkontribusi dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang bermutu. Pendidikan juga berfungsi mengembangkan kemampuan dan menumbuhkan nilai dan sikap yang serasi dengan tuntutan pembangunan dan kehidupan negara bangsa Indonesia yang modern. Dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, pada UUD 1945 Pasal 33 dan Pasal 34 secara khusus dirancang agar "Pembangunan ekonomi nasional ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat", atau "terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia". Untuk mewujudkan bangsa yang cerdas, diperlukan bangsa yang terdidik dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, agar dapat meningkatkan taraf kehidupan bangsa. Begitu juga dalam kesempatan memperoleh pendidikan harus diperluas, dan pendidikan harus bermutu.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bergerak sangat cepat, sehingga perlu ditanggapi dan dipersiapkan dalam menghadapinya sesuai dengan kebutuhan pembangunan, dan bangsa yang cerdas harus mampu untuk beradaptasi dan memanfaatkan dengan memiliki keahlian untuk menggunakan, mengelola, dan senantiasa menyesuaikan ilmu pengetahuan dan teknologi baru tersebut. Dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, karakter bangsa merupakan kebutuhan setiap manusia sepanjang masa, sejak kemerdekaan yang diperoleh melalui perjuangan fisik yang berat, bangsa Indonesia menyatakan diri sebagai suatu bangsa yang bersatu dan berdaulat, sebagaimana halnya bangsa-bangsa lain. Bangsa Indonesia berkeinginan untuk memelihara persatuan dan kedaulatan. Untuk itu diperlukan kebijakan-kebijakan dan program-program nasional yang bertujuan memelihara dan memantapkan rasa kebangsaan Indonesia bagi generasi muda. Pendidikan menjadi media kunci dalam hal ini. Sejarah perjuangan bangsa menjadi acuan pokok bagi pergerakan dan

kemantaban rasa kebangsaan pada setiap warga negara Indonesia. Pemerintah adalah pihak yang paling bertanggungjawab dalam memelihara keutuhan, kedaulatan, pemeliharaan dan penguatan kebangsaan. Selain itu bangsa Indonesia harus tampil ke dunia luar sebagai sosok bangsa yang dikenal memiliki ciri-ciri khas tertentu karena pancaran karakternya tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- _____, (1962). *Toward a General Theory of Action*, New York: Harper Torchbook.
- _____, (2000). *Pendidikan Nasional sebagai Wahana: Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, Membangun Peradaban Negara-Bangsa*. Jakarta: CINAPS.
- _____. (2010). *Pendidikan Karakter & Membangun Karakter Bangsa*. (Paper).
- Almond, G. A., & Sydney Verba. (1965). *Civic Culture: Political Attitude & Democracy in 5 Nations*. Boston: Little Brown & Co.
- Azyumardi Azra. (2002). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan Demokratisasi* Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Doni Koesoema, A. (2007). *Tiga Matra Pendidikan Karakter*, dalam Majalah BASIS, Agustus-September.
- Fedyani S. Achmad & Mulyawan Karim. (2008). *Refleksi Karakter Bangsa*. Jakarta :ILUN.
- Munandar, A.A. I(1990). *Kegiatan Keagamaan di Pawitra Gunung Suci di Jawa Timur Abad 14—15*. Tesis Magister Humaniora. Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Parsons, T. (1962). *School Class as a Social System*. New York: Harper Torchbook.
- Santiko, H., (1986). *Mandala (Kedwaguruan) Pada Masyarakat Majapahit*, dalam *Pertemuan Ilmiah Arkeologi IV, buku IIB Aspek Sosial Budaya, Cipanas, 3—9 Maret 1986*. Pusat Penelitian Arkeologi Nasional.
- Soedijarto. (2008). *Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.